

## Eksistensi dan Kepercayaan Pemerintah Terhadap LSM Lingkungan dalam Penerapan *Green Politics* di Indonesia

Sinta Apriyani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran  
corresponding author: [sintaapriyani@gmail.com](mailto:sintaapriyani@gmail.com)

Received: January 2024; Accepted: March 2024; Published: June 2024

### *Abstract*

*Political activism, which cares about the environment and is embodied in the vision, mission, and programs of government and political action, must fight for the future. The form of political concern for the environment, previously referred to as environmental policy in Indonesia, has been implemented through the submission of petitions by Indonesian environmental NGOs to pay attention to ecological aspects, lawsuits over policies, and mass mobilization actions. A survey is conducted in the study. The data used to use other data to create a form of environmental and political awareness, or what is then known as "green policy" in Indonesia, is now being used by some NGOs in Indonesia to file petitions, legal procedures on regulations, and large-scale mobilization factors to draw attention to environmental aspects. The literature was used in the study. The data comes from other documents, regulations, and books. The community and the government feel the problem of this justice, which supports what is happening on social media in Indonesia. The current reality of the "green" political narrative, which some NGOs can appreciate, is not fully understood and is on the list. The existence of green cities in Indonesia is vital and should be held accountable by the government for places in Indonesia.*

*Keywords: Non-Governmental Organization; environment; green politics*

### **Abstrak**

Aktivisme politik, yang peduli lingkungan dan diwujudkan dalam visi, misi dan program pemerintah dan aksi politik, harus berjuang untuk masa depan. Bentuk kepedulian politik terhadap lingkungan hidup, yang sebelumnya disebut sebagai kebijakan lingkungan di Indonesia, telah dilaksanakan melalui pengajuan petisi oleh LSM lingkungan Indonesia untuk memperhatikan aspek ekologi, gugatan atas kebijakan, dan aksi mobilisasi massa. Metode penelitian ini akan menggunakan tinjauan pustaka. Sumber data dengan pemakaian sumber data sekunder yakni dokumen, undang-undang, artikel ilmiah, buku ilmiah. Isu keadilan lingkungan terwujud berkat dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap apa yang perlu hadir di platform media sosial di Indonesia. Realitas saat ini terkait dengan narasi politik hijau, yang dapat dinilai oleh LSM lingkungan, belum sepenuhnya disadari dan hanya indah di atas kertas: kehadiran kebijakan hijau di Indonesia diperlukan dan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah atas lingkungan alam di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat; lingkungan; politik hijau

## PENDAHULUAN

Masalah lingkungan menarik banyak perhatian pada abad ke-21 ini. Topik penggunaan lahan, perubahan iklim dan limbah saat ini sedang hangat diperdebatkan. Berbagai bentuk kerusakan dan penghancuran sumber tanaman dan organisme hidup yang menjadi kebutuhan manusia terjadi, dan jika terus memburuk, dapat memperburuk kehidupan manusia dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini diperlukan orang-orang dengan rasa tanggung jawab, saling membutuhkan, dan menghormati lingkungan. Karena itu, tanah yang dihuni oleh organisme hidup membutuhkan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Manajemen yang cerdas juga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Pada saat ini banyak ungkapan-ungkapan yang menjadi sorotan mengenai *green*, seperti *green politics*, *green party*, *green banking*, *greendeen (green religion)*, *green market*, *green building*, *green democracy*, *green constitution*, *green legislation*, *green budget*, *green economic*, *green bench*, Prinsip hijau digunakan dalam kata-kata seperti "hijau" dan mewakili komitmen terhadap lingkungan. Prinsip ini adalah bagian dari ideologi yang lebih luas yang mengambil sebagai titik awal utamanya hubungan antara manusia dan alam. Hijau adalah cara, bukan hukum, bukan kata kerja, bukan kata sifat (Nurmardiansyah, 2015).

Thomas L. Friedman mengaitkan dengan kata "hijau" dalam karyanya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, "hijau" bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi persoalan yang dianggap baik. Hijau saat ini adalah sarana pertumbuhan, sarana arsitektur, sarana desain, alat produksi, cara kerja dan cara hidup terbaik. Menurut Thomas L. Friedman, hijau berarti bergerak dari obrolan ringan ke yang terbaik, dari yang dipilih ke yang diperlukan, dari kecerdasan ke kemenangan, dari masalah yang tidak terpecahkan ke peluang emas. Menurut Thomas L. Friedman, apa pun yang dapat Anda lakukan untuk mengadopsi gaya hidup hijau akan membuat Anda lebih kuat, lebih sehat, lebih aman, lebih inovatif, lebih kompetitif, dan lebih dihormati. Ketika Thomas L. Friedman mengatakan bahwa "hijau adalah merah, putih, dan biru baru," ini adalah strategi untuk mengurangi pemanasan global, perusakan keanekaragaman hayati, kemiskinan energi, kediktatoran minyak, dan kekurangan energi. Kami memecahkan masalah kami untuk memecahkan masalah yang dimiliki dunia (Friedman, 2009).

Gerakan "Kebijakan Hijau" di Indonesia dimulai dengan kesadaran publik bahwa terdapat berbagai kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang berlebihan dan strategi pembangunan yang eksploitatif yang mengancam

kelestarian lingkungan. Menurutnya, esensi pembangunan masa depan adalah mengupayakan keberlanjutan kehidupan. Untuk keberlanjutan kehidupan ini, ada beberapa prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan (Salim, 2003). Sejauh ini, dampak dari kebijakan lingkungan yang rapuh dapat dilihat pada hasil kebijakan investasi. Pemerintah terlalu toleran untuk membiarkan kapitalis masuk ke negara ini dan mengeksploitasi alam Indonesia tanpa hambatan. Akibatnya, degradasi lingkungan terjadi di mana-mana, yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kerusakan dan bencana lingkungan di Indonesia adalah saatnya kita membutuhkan kekuatan politik hijau untuk menyelesaikannya, sehingga sudah saatnya politik hijau dan Partai Hijau, yang menjaga keseimbangan antara lingkungan dan alam, untuk hadir di tengah sistem politik Indonesia dan melakukan hal-hal nyata.

Tidak hanya itu, pada tahun pemilihan umum, ada banyak pohon di setiap daerah di Indonesia dihiasi dengan spanduk di mana gambar kepribadian partai politik dan calon parlemen dapat dilihat. Banyak komentator politik berpendapat bahwa tidak ada aturan pemilu yang melindungi tanaman dari kegiatan kampanye politik, dan bahwa ada sangat sedikit partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan dan yang kandidatnya membahas masalah lingkungan dalam kampanye, kampanye, dan pandangan partai mereka, dan bahwa kebanyakan dari mereka lebih suka mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan gratis. Demokratisasi, korupsi, Upaya untuk menyelamatkan dunia melalui LSM bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi semua orang yang hidup, berkontribusi pada tanah, dan memainkan peran di planet ini. Dengan pemerintah bertindak sebagai regulator, Indonesia dapat bergabung untuk mengembangkan langkah-langkah potensial bagi negara. Para peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan para peneliti.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan metode kualitatif, suatu metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok orang dari masalah sosial. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep dan fenomena, masalah sosial (Creswell, 2016). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan literatur yang berfokus terutama pada buku dan literatur lainnya. Penulis mengkaji secara kritis pengetahuan gagasan dan

penemuan ilmiah dari berbagai publikasi terkait pelaksanaan Partai Hijau di Indonesia, dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang terkait dengan artikel ini.

peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif (Miles et al., 2019). Kegiatan analisis terdiri dari tiga kegiatan yang berlangsung secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Proses siklus interaksi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data berlangsung secara bersamaan dan terjalin dalam bentuk paralel yang membentuk wawasan bersama yang disebut "analisis" (Miles et al., 2014). Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan hijau, indikator ini mengkritik kehadiran dan kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap LSM lingkungan akibat penerapan kebijakan hijau Indonesia yang memperhatikan aspek lingkungan. Dalam penerapan kebijakan lingkungan Indonesia, kita akan dapat menjelaskan dan menganalisis keberadaan pemerintah yang memberikan peraturan dan struktur kepada LSM lingkungan dalam bentuk undang-undang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Krisis iklim menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah cara terbaik untuk melewati krisis ini. Krisis iklim telah dan akan terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan dan pedesaan dalam berbagai cara, termasuk dalam hal masalah pangan. Ketika masalah krisis iklim menjadi lebih kompleks, sekarang saatnya untuk mengambil inisiatif dan perubahan untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, sehat, bergizi, dan terjangkau untuk semua. Komitmen konkret Indonesia terhadap isu-isu lingkungan global secara aktif diimplementasikan melalui partisipasinya dalam Protokol Kyoto, terutama pada era Joko Widodo, yaitu sesi ke-21 Conference of the Parties/COP21. Proses negosiasi COP21 melihat Indonesia dan 195 negara anggota lainnya menyimpulkan perjanjian yang disebut Perjanjian Paris. Indonesia berperan dalam penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Paris. Diharapkan ratifikasi Perjanjian Paris akan membantu Indonesia menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan baik dan merencanakannya untuk kepentingan nasional (Afrizal, 2019).

Sorotan dari berbagai studi Greenpeace tentang perkebunan pangan adalah bahwa mereka mengancam keanekaragaman hayati Indonesia, yang telah mengeksploitasi hutan, dan pentingnya proyek perkebunan pangan merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini tidak sejalan dengan upaya krisis pangan, apalagi proyek ini menguras keuangan publik. Pemerintah harus menghentikan proyek perkebunan pangan dan mengembalikan bisnis pangan kepada petani (Khalid, 2022). Pemerintah Indonesia (dalam hal ini,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia) ingin meluncurkan program yang melibatkan organisasi lingkungan Indonesia dengan tujuan keadilan pangan, tetapi menurut Fitria Shahrul, seorang aktivis hutan senior di Greenpeace Indonesia, upaya pemerintah untuk mencapai pola makan yang seragam melalui Program Food Estate sebenarnya mengancam sistem budaya pangan lokal.

Dalam pidato kepresidenannya di Jakarta pada peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan, ia berfokus secara eksklusif pada industri ekstraktif dan keuntungan, yang berkontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Inisiatif yang dikutip adalah Rencana Kawasan Industri Hijau (Sutrisno, 2021) yang secara tidak langsung mengulang kesalahan yang sama saat proyek Food Estate. Pemerintah Indonesia mengacu pada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Meskipun banyak solusi yang telah direkomendasikan oleh LSM lingkungan di Indonesia. Sebagai contoh, kerangka kerja yang dibuat oleh WWF Indonesia mengenai respon yang tidak memadai dari kementerian dan lembaga Indonesia terhadap sistem keadilan pangan hanya diisyaratkan dan diperkuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak ada hubungannya dengan lembaga lain. Gambar itu indah hanya di atas kertas, tidak dipertahankan dan belum menjadi prioritas pembangunan dalam kerangka politik.

Pemerintah Indonesia memiliki harapan besar untuk pengembangan IKN di provinsi Kalimantan Timur, yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan emisi karbon dengan mengorbankan hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang bergerak menuju kegagalan politik dan bergerak semakin jauh dari kebijakan dan kebijakan hijau yang dibahas dalam penelitian ini. Kolaborasi di bawah Switch Asia Local Harvest Project tentunya memainkan peran penting dalam kebijakan sistem pangan Indonesia tentang adaptasi iklim saat ini dan perlu dilakukan di tingkat lokal dan nasional untuk memberikan solusi berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Hak atas lingkungan, serta hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, bersifat universal, yang berarti melekat pada setiap manusia dan bahwa itu adalah tugas masyarakat nasional dan internasional dan negara untuk menegakkan dan mewujudkannya setiap saat. Degradasi lingkungan dan krisis iklim melalui pola pembangunan yang eksploitatif. Laporan AR6 2022 di (Report, 2022) mencatat bahwa dunia akan menghadapi

risiko iklim selama 20 tahun ke depan dan krisis iklim akan meningkat. Efek dari gelombang panas, kekeringan, banjir, dan krisis pangan dan air yang terkait adalah fakta yang tak terbantahkan, dan para ahli memperingatkan terhadap mereka untuk mengingatkan umat manusia tentang mereka. Krisis iklim telah menyebabkan, dan akan terus menyebabkan, kerugian dan kerusakan yang meluas pada alam dan manusia (Khalid, 2022).

Inisiatif ini, yang dilaksanakan WWF Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat menumbuhkan dan merangsang pengambilan keputusan pemerintah, karena kehadiran jaringan LSM di bidang pengelolaan sistem pangan dapat menjawab tantangan masalah sistem pangan di Indonesia. Secara khusus, organisasi non-pemerintah (LSM) seperti nirlaba, badan amal, dan perusahaan sosial dapat membantu mencapai tujuan masyarakat. LSM memiliki potensi untuk memberikan manfaat sosial dan lingkungan (Elton et al., 2022). Dalam menghadapi tantangan lingkungan besar dan pergolakan besar, kerja sama yang erat dengan LSM dipandang penting untuk tujuan pembangunan dalam hal transformasi berkelanjutan sistem pangan Indonesia (Konijnendijk, 2014).

Organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan pemerintah perlu mencapai keseimbangan antara menjauhkan institusi dari pemerintah sambil bekerja dengan pemerintah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan sektor public (Cadman et al., 2020). WWF Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah, seperti pembentukan Program Panen Lokal Switch Asia untuk mengatasi krisis pangan di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua, dan LSM seperti CIFOR, HIVOS dan KEHATI juga secara aktif mendukung program ini. Selain keberhasilan, ada beberapa rintangan yang disimpulkan oleh para peneliti dari hasil penelitian, yaitu bahwa kerangka Rencana Gizi Nasional tidak digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan kegiatan di unit kerja kementerian dan lembaga di Indonesia, dan bahwa tidak ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan untuk memastikan implementasi dalam kerangka yang ditetapkan oleh WWF Indonesia.

Menurut penulis, pemerintah bergantung pada keputusan dan kebijakan PBB / UNFCCC. Padahal, arti koordinasi yang sebenarnya adalah pemerintah yang mendapatkan warga negara yang aktif untuk memperjuangkan apa yang dipandang penting dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Bryson et al., 2014). Suatu instruksi presiden dapat dianggap lebih penting dibandingkan dengan arahan dari LSM/NGO karena prioritas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Menurut penulis, pemerintah, presiden, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, dan WWF Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan mereka.

Saling menguntungkan adalah ciri khas kolaborasi yang sukses, dan program yang bekerja sama dapat menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal penggalangan dana, kolaborasi dianggap penting. Namun, penelitian Doucet berpendapat bahwa pendanaan pemerintah dapat mendorong individu dan organisasi untuk merasa terhubung dengan pemerintah (Doucet et al., 2023). Pemerintah tidak dapat mempertahankan otoritas dalam proses pengambilan keputusan LSM, tetapi mereka dapat mengendalikan sifat kerja sama. Menurut penulis, kerja sama antara pemerintah dan LSM dalam konteks analisis membutuhkan kepercayaan antara pemerintah dan LSM saat beroperasi di ruang yang sama. Dengan demikian, jika komitmen atau kesepakatan dibuat untuk kerja sama jangka panjang dan tidak ada rasa saling percaya, kedua belah pihak akan mencegah LSM untuk mewujudkan dampak jangka panjang dari program dan kegiatan mereka.

Sebagai contoh, kehadiran LSM WWF Indonesia berfokus pada sektor lingkungan sebagai ekspresi kesadaran dan responsivitas masyarakat sipil terhadap pemerintah Indonesia (dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup). Ini adalah tindakan di mana WWF Indonesia memainkan peran penting dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung oleh literatur bahwa LSM memiliki suara dalam prioritas pemerintah (Fyall, 2016). Di Indonesia, LSM bekerja sama dengan pemerintah untuk memerangi ancaman dampak krisis iklim dan krisis lingkungan. WWF Indonesia menarik perhatian pada pengelolaan sumber daya alam yang adil untuk memastikan manfaat masa depan untuk konservasi, dan studi ini menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan LSM untuk menentukan penerapan kebijakan hijau. Partisipasi LSM WWF Indonesia merupakan mekanisme yang efektif untuk mempercepat mobilisasi sosial dan kemasyarakatan terhadap isu pangan di Indonesia. WWF Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah dengan kehadiran yang kuat, membantu memetakan dan dengan cepat mencapai tujuan dan mencari dukungan dari para pemangku kepentingan lokal. Selain itu, penulis berpendapat bahwa terlepas dari hubungan keuangan di mana semua aktor terlibat, baik peran mereka dan kendala mereka dalam kegiatan bersama tetap saling menguntungkan.

Menurut penulis, hubungan antara pemerintah dan LSM membutuhkan aspek kepercayaan di antara mereka untuk mengarah pada kerja sama yang berkelanjutan dan ukuran keberhasilan. Secara sosial dan politik, kepercayaan adalah prasyarat yang sangat

diperlukan untuk pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik dan kepercayaan saling membutuhkan, dan kepercayaan mempromosikan tata kelola yang baik. Kepercayaan adalah hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Nawawi, 2009). Kepercayaan antara kedua belah pihak menguntungkan kedua belah pihak dengan mencapai hasil yang diharapkan. Kepercayaan adalah dasar dari kerja sama organisasi dan berperan dalam kegiatan yang didefinisikan bersama.

Secara khusus, penguatan dan penguatan kerja sama antara pemerintah dan LSM lingkungan, serta membangun hubungan saling percaya, merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang sinergis. Ketika kedua belah pihak memiliki harapan yang sama, tingkat kepercayaan yang tinggi terwujud. Penulis percaya bahwa kepercayaan diperlukan untuk kolaborasi, di mana kita dapat saling mendukung untuk menemukan solusi atas tantangan yang kita hadapi. Kepercayaan telah muncul sebagai salah satu faktor terpenting dalam keberlanjutan sistem politik (Blind, 2006). Penelitian Baumber menganalisis bahwa kepercayaan menjadi faktor yang diabaikan yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan (Baumber, 2018).

Pemerintah harus melibatkan LSM lingkungan Indonesia dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pemerintah Indonesia juga menyebutkan perlunya dukungan internasional (Khalid, 2022). Namun, di Indonesia, kehadiran LSM lingkungan bekerja sama dengan Uni Eropa (UE) menunjukkan bahwa telah ada dukungan internasional selama beberapa waktu. Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak mempercayai LSM lingkungan di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mempercayai rekomendasi LSM lingkungan dan memiliki keberanian untuk menerapkan ide-ide mereka. Oleh karena itu, tidak tergantung pada keputusan dan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNFCCC.

Kredibilitas politik dapat diarahkan pada organisasi yang berhubungan dengan bagian LSM yang mempercayai atau tidak mempercayai pemerintah karena puas atau tidak puas dengan hasil kebijakan yang dikembangkan bersama. Secara sosial dan politik, kepercayaan merupakan prasyarat penting untuk pemerintahan yang baik, dan kepercayaan adalah perwujudan dari pemerintahan yang baik. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu memahami bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan bahwa membangun kepercayaan membutuhkan kegiatan dan program berkelanjutan antara pemerintah dan LSM. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki tekad untuk melakukan upaya yang dijelaskan di atas untuk memperkuat dan menjaga kepercayaan.

## KESIMPULAN

Prinsip hijau adalah mengadvokasi lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menopang hubungan antara manusia dan alam, sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kelestarian lingkungan. Di Indonesia, ada peningkatan gerakan politik hijau, didukung oleh kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan seperti Madaniberkelanjutan.id, Greenpeace ID, fridaysforfuture.id, teensgogreen.id dan Green Leaders. Di negara-negara maju, kebijakan lingkungan hidup terus berkembang, kebijakan hijau Indonesia kurang memiliki minat publik dan dukungan untuk representasi barang lingkungan dalam sistem politik Indonesia, dan aturan partai politik untuk kebijakan hijau tidak terwakili dalam sistem politik Indonesia. Secara khusus, penguatan dan penguatan kerja sama antara pemerintah dan LSM lingkungan, serta membangun hubungan saling percaya, merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang sinergis. Ketika kedua belah pihak memiliki harapan yang sama, tingkat kepercayaan yang tinggi terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global. Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII). *Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia*, 10, 12. <https://aihii.or.id/prosiding-vennas-10/politik-luar-negeri-indonesia-era-joko-widodo-dalam-isu-lingkungan-global/>
- Baumber, A. (2018). Energy cropping and social licence: What's trust got to do with it. *Science Direct*, 108, 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.10.023>
- Blind, P. (2006). Building Trust In Government In The Twenty-First Century,. *Expert Associate UNDESA*, 31. [https://www.researchgate.net/publication/237829301\\_Building\\_Trust\\_in\\_Government\\_in\\_the\\_Twenty-First\\_Century\\_Review\\_of\\_Literature\\_and\\_Emerging\\_Issues](https://www.researchgate.net/publication/237829301_Building_Trust_in_Government_in_the_Twenty-First_Century_Review_of_Literature_and_Emerging_Issues)
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Cadman, R., MacDonald, B. H., & Soomai, S. S. (2020). Sharing victories: Characteristics of collaborative strategies of environmental non-governmental organizations in Canadian marine conservation. *Science Direct*, 15, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103862>
- Creswell, J. W. (2016). *Design Research: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (4th ed.). pustaka pelajar.

- Doucet, T., Duinker, P., Charles, J., Steenberg, J., & Zurba, M. (2023). Characterizing non-governmental organizations and local government collaborations in urban forest management across Canada. *Reseach Square*, 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2958350/v1>
- Elton, A. J., Harper, R. W., Griffith, E. E., & Weil, B. (2022). Exploring urban forestry non-governmental organisations (NGOs) in the eastern United States. *Arboricultural Journal The International Journal of Urban Forestry*, 179–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03071375.2022.2129202>
- Friedman, T. L. (2009). *Hot, Flat, and Crowded Why The World Needs A Green Revolution - and How We Can Renew Our Global Future*. Penguin Books Limited. [https://www.google.co.id/books/edition/Hot\\_Flat\\_and\\_Crowded/Syd\\_mi25emQC?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Hot_Flat_and_Crowded/Syd_mi25emQC?hl=id&gbpv=0)
- Fyall, R. (2016). The Power of Nonprofits: Mechanisms for Nonprofit Policy Influence. *Public Administration Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12550>
- Khalid, K. (2022, December 10). Kita Semua Memiliki Hak atas Lingkungan Hidup. *Greenpeace*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55905/kita-semua-memiliki-hak-atas-lingkungan-hidup/>
- Konijnendijk, C. (2014). From Government to Governance: Contribution to the political ecology of urban forestry. *Reseach Gate*, 35–46. <https://doi.org/10.4324/9781315882901>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3. United States: Sage Publication*. Sage Publication. [https://books.google.co.id/books?redir\\_esc=y&hl=id&id=p0wXBAAAQBAJ&q=condensation#v=snippet&q=condensation&f=false](https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=p0wXBAAAQBAJ&q=condensation#v=snippet&q=condensation&f=false)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Nawawi, J. (2009). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jgov.v2i1.1130>
- Nurmardiansyah, E. (2015). Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 37. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422>
- Report, I. S. A. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Global to Regional Atlas. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- Salim, E. (2003). *Hasil-hasil dan tindak lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*. Departemen Luar Negeri. [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=catalog&content\\_type=54&viewid=6324](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=catalog&content_type=54&viewid=6324)
- Sutrisno, E. (2021, November 20). Membangun Kawasan Industri Hijau. *Indonesia.Go.Id*, 3. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3438/membangunkawasan-industri-hijau>